



## **Analisis Kuantitatif Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan Terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Lombok Barat**

**Ety Kurniawati,<sup>1\*</sup> Ibrahim,<sup>1</sup> Nurhayati<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Email: etykurniawati542@gmail.com, ibrahimali@ummat.ac.id, nurhayati.faperta.ummat@gmail.com

\*Korespondensi

**Article History:** Received: 28-04-2025, Revised: 24-05-2025, Accepted: 20-06-2025, Published: 30-06-2025

### **Abstrak**

Desa memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk pengelolaan lingkungan. Di Kabupaten Lombok Barat, yang rawan bencana, aspek lingkungan menjadi faktor penting dalam menilai kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Penelitian ini bertujuan menganalisis pembangunan desa berbasis lingkungan dan hubungan antara ketahanan lingkungan, sosial, dan ekonomi sebagai pembentuk IDM. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan data sekunder dari Dinas PMD Dukung Provinsi NTB dan studi literatur, serta data primer melalui wawancara dengan pemangku kepentingan. Analisis dilakukan melalui observasi dan statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Sosial memiliki pengaruh paling kuat terhadap IDM dibandingkan dua indeks lainnya. Indeks Ketahanan Lingkungan memiliki indikator yang masih rendah, terutama pada aspek Tanggap Bencana, dengan 50 desa masuk kategori super prioritas dan 47 desa kategori prioritas. Sebaliknya, indikator Kualitas Lingkungan menunjukkan capaian yang lebih baik. Terdapat korelasi lemah antara Indeks Ketahanan Sosial dan Ekonomi, sementara tidak ditemukan korelasi antara indeks lainnya. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan aspek sosial dan lingkungan dalam strategi pembangunan desa untuk mencapai status desa mandiri. Desa-desanya telah merumuskan kegiatan pembangunan berbasis lingkungan dalam dokumen perencanaan desa namun kegiatan masih bersifat rutin dan administrative, perlunya transformasi pendekatan pembangunan lingkungan desa dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menuju pemecahan masalah lingkungan secara strategis dan terukur.

### **Kata Kunci:**

indeks desa membangun; lingkungan; pembangunan desa

### **Abstract**

Villages have a strategic role in supporting sustainable development goals, including environmental management. In West Lombok Regency, which is prone to disasters, environmental aspects are an important factor in assessing village independence through the Village Development Index (IDM). This study aims to analyze environmentally-based village development and the relationship between environmental, social, and economic resilience as the determinants of IDM. The method used is quantitative descriptive with secondary data from the NTB Province PMD Dukung Service and literature studies, as well as primary data through interviews with stakeholders. The analysis was carried out through observation and simple statistics. The results of the study show that the Social Resilience Index has the strongest influence on IDM compared to the other two indices. The Environmental Resilience Index has indicators that are still low, especially in the Disaster

Response aspect, with 50 villages in the super priority category and 47 villages in the priority category. In contrast, the Environmental Quality indicator shows better achievements. There is a weak correlation between the Social and Economic Resilience Index, while no correlation was found between the other indices. This study emphasizes the importance of strengthening social and environmental aspects in village development strategies to achieve independent village status. Villages have formulated environmentally-based development activities in village planning documents, but activities are still routine and administrative. There is a need for a transformation of the village environmental development approach from merely fulfilling administrative obligations to solving environmental problems in a strategic and measurable manner.

**Keywords:**

environment; village development index; village development



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pendahuluan

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) (Kemendesa PDTT, 2020). Dengan lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran desa dalam pembangunan semakin diperkuat, menjadikan desa sebagai subyek pembangunan yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, dan memberdayakan masyarakatnya sendiri (Firmansyah et al., 2024). Namun demikian, pembangunan desa masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya produktivitas masyarakat serta buruknya kualitas lingkungan permukiman desa (Widaningsih & Puspita, 2017).

Pembangunan desa idealnya tidak hanya bertumpu pada peningkatan ekonomi semata, melainkan juga harus memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem bagi generasi yang akan datang (Nugroho & Pangaribowo, 2024). Pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan kerap berkontribusi pada degradasi ekosistem, penurunan kualitas hidup masyarakat, serta meningkatkan kerentanan terhadap bencana (Anwar, 2022). Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis lingkungan menjadi penting, di mana setiap program pembangunan mempertimbangkan pelestarian lingkungan secara terpadu dalam proses perencanaan dan implementasinya (Ikhsan et al., 2021).

Pembangunan desa berbasis lingkungan merupakan pendekatan strategis untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan perlindungan sumber daya alam. Pendekatan ini mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan desa guna menjamin kesejahteraan jangka panjang, menjaga kualitas lingkungan, serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap bencana (Hidayat et al., 2025). Pada level desa, ketahanan lingkungan belum menjadi perhatian serius sementara keberlangsungan hidup dan perekonomian masyarakat desa bergantung pada alam (Subekti & Ulfah, 2022).

Pendekatan pembangunan desa berbasis lingkungan memiliki kaitan erat dengan Indeks Desa Membangun (IDM), instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan desa yang dibentuk berdasarkan tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan

Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) (Kementerian Desa PDTT, 2016). Ketiga indeks ini, sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan (Astika & Subawa, 2021). Ketiga komponen ini memberikan gambaran komprehensif kondisi desa. IKS mencerminkan kualitas sumber daya manusia, tingkat kesehatan, akses terhadap pendidikan, akses pemukiman layak serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. IKE menggambarkan keragaman produksi masyarakat, akses ke pusat pelayanan perdagangan serta akses ke lembaga keuangan. Sementara IKL menggambarkan Kualitas lingkungan dan mitigasi desa terhadap resiko bencana.

Pendekatan pembangunan berbasis lingkungan sebagai salah satu pembentuk IDM diperlukan untuk meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa. Status ini akan digunakan untuk instrumen koordinasi Kementerian/Lembaga maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus untuk kebutuhan pemetaan tipologi Desa dan penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa (Kementerian Desa PDTT, 2016). Instrumen ini juga berfungsi untuk mengklasifikasikan desa guna menentukan alokasi anggaran serta intervensi kebijakan yang tepat dalam mendukung pembangunan desa (Moan Bura, 2021).

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan dinamika perkembangan IDM yang menarik. Dari 119 desa yang tersebar di 10 kecamatan, masih terdapat desa-desa yang stagnan dalam status pembangunan selama lima tahun terakhir, 24 (dua puluh empat) desa berkategori Berkembang dari tahun 2020 s/d 2024. Secara geografis Kabupaten Lombok Barat terbagi menjadi 4 (empat) karakteristik wilayah yaitu Daerah Pegunungan, Berbukit, Dataran Rendah dan Pesisir, sehingga memiliki banyak potensi dan Kekayaan sumber daya alam yang beragam mulai dari kawasan hutan, lahan pertanian, perkebunan dan pantai. Disamping itu juga memiliki sumber daya tambang baik logam maupun non logam, seperti pasir, kerikil, tanah urug, batu kali, dan tanah liat, yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Dengan keragaman geografis ini, daerah ini memerlukan pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap potensi kekayaan alam dan lingkungan yang ada (Muharuddin, 2019).

Seiring dengan potensi tersebut, Kabupaten Lombok Barat juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungannya. Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Mataram ibukota Provinsi NTB, terjadi tekanan penduduk dan lajunya aktivitas ekonomi. Luas wilayah dengan kemiringan 0-2% adalah yang paling besar yaitu 37,3%, sangat potensial untuk pengembangan wilayah pemukiman. Alih fungsi lahan banyak terjadi tidak hanya ke pemukiman namun juga ke sektor lainnya seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berbagai kebutuhan terutama pangan, yang menyebabkan daya dukung berkurang. Daya dukung lingkungan sangat terkait dengan kapasitas ambang batas sebagai dasar untuk membatasi rekomendasi pertumbuhan (Amru et al., 2025).

Secara tidak langsung hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan kondisi lahan akibat berbagai aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan beban pencemaran yang dihasilkan. Demikian pula dengan potensi penambangan, meskipun menghasilkan komoditas bernilai ekonomi, namun berpotensi besar

merusak lingkungan. Dampaknya terasa saat musim hujan, ketika sejumlah wilayah sering dilanda banjir bandang dan tanah longsor. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, selama kurun waktu 5 tahun dari 2020-2024 telah terjadi 87 kali kejadian bencana alam di Kabupaten Lombok Barat, terdiri dari Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Gempa Bumi dan Banjir Rob. Sehingga Kabupaten Lombok Barat termasuk salah satu Kabupaten yang rawan bencana.

Pencemaran lingkungan, kerusakan lahan, dan kerentanan bencana merupakan faktor yang dapat menurunkan kualitas hidup dan status kemajuan desa. Indeks Ketahanan Lingkungan sebagai bagian dari IDM menilai kualitas lingkungan hidup melalui indikator pencemaran (air, tanah, udara), serta mitigasi bencana. Namun, dimensi ini seringkali belum menjadi prioritas dalam pembangunan desa (Ariyanto, 2022 ; Moan Bura, 2021)). Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas hidup makhluk disekitarnya sehingga masalah pencemaran menjadi pokok dalam pembangunan berkelanjutan (Ariyanto, 2022). Pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan berpotensi merusak ekosistem, seperti degradasi lahan, kerusakan hutan, dan polusi lingkungan. Jika faktor bencana alam tanpa penanganan yang cepat dan tepat, atau konflik sosial terus terjadi berkepanjangan, maka status desa berpotensi untuk menurun (Moan Bura, 2021).

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IDM, namun belum secara spesifik mengkaji integrasi pendekatan pembangunan berbasis lingkungan terhadap peningkatan IKL dan kontribusinya terhadap status desa. Oktaviana (2017) melakukan penelitian terkait rendahnya IDM di Wilayah Provinsi Banten, dimana variabel yang rendah ada pada IKE dan IKL. Moan Bura (2021) menyoroti faktor faktor pendukung IDM di Kabupaten Mempawah ditinjau dari aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, dimana dimensi sosial sebagai faktor yang paling banyak menyumbang peningkatan nilai IDM, hal ini juga didukung dengan adanya intervensi kebijakan pemerintah pada peningkatan infrastruktur untuk layanan sosial dasar. (Astika &Subawa, 2021) meneliti terjadinya penurunan status IDM di Desa Penatahan karena lemahnya perencanaan pembangunan yang tidak sesuai regulasi. IDM Desa Penatahan turun dari kategori Maju pada tahun 2016 ke Berkembang ditahun 2018, dan faktor penurunan ada pada aspek ekonomi dan lingkungan, program kegiatan lebih dominan pada pembangunan sarana prasarana sosial dasar yang cenderung menunjang faktor sosial saja. Ariyanto (2022) melakukan penelitian Pengaruh APBDesa dengan IDM dan IKL. Penelitian menghasilkan adanya pengaruh pembiayaan dalam APBDesa termasuk Dana Desa terhadap IDM, belanja anggaran berpengaruh terhadap IKL. Fasya et.al. (2020) juga menyoroti hubungan antara kemiskinan dan IDM. Kebanyakan studi masih bersifat parsial dan belum menyoroti keterkaitan ketiga dimensi IDM secara komprehensif. Berbagai studi ini menunjukkan bahwa dimensi lingkungan cenderung kurang mendapatkan prioritas dalam perencanaan dan implementasi pembangunan didesa.

Kesenjangan penelitian muncul pada minimnya kajian yang secara spesifik menganalisis kontribusi pendekatan pembangunan desa berbasis lingkungan terhadap peningkatan IKL dan bagaimana hal ini berpengaruh terhadap status IDM secara keseluruhan. Padahal, dalam konteks keberlanjutan pembangunan desa, integrasi antara IKS, IKE, dan IKL menjadi kunci untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan status kemajuan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pembangunan desa di Kabupaten Lombok Barat ditinjau dari aspek sosial, ekonomi dan lebih khusus lagi dari aspek lingkungan. Sejauh mana hubungan dari ketiga aspek tersebut terhadap Indeks Desa Membangun. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif guna mendukung peningkatan pembangunan desa yang berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan lingkungan di masa mendatang.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melihat perkembangan kemajuan desa melalui Indeks Desa Membangun di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Sumber data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Dukcapil Provinsi NTB dengan rentang waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Penentuan Sampel menggunakan Metode Purposive Sampling, pertama dengan melihat wilayah Kecamatan yang paling banyak desa berstatus Mandiri, Maju dan Berkembang, yang kemudian menetapkan masing masing 1 (satu) desa dalam kecamatan tersebut sebagai sampel untuk masing masing status dimana desa tersebut juga memiliki aktivitas penambangan galian non logam. Ketiga desa tersebut adalah Desa Lingsar kecamatan Lingsar dengan Status Mandiri, Desa Keru Kecamatan Narmada dengan status Maju dan Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung dengan status Berkembang. Prosedur penelitian dilakukan dengan observasi pada data IDM, observasi pada dokumen perencanaan desa yaitu RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa, selanjutnya melakukan analisis mendalam terhadap proses perencanaan yang telah dilakukan desa dan melihat kegiatan kegiatan berbasis lingkungan yang direncanakan dan dilaksanakan desa.

Pengumpulan data dan informasi juga melalui wawancara bersama Perangkat Desa dan Tenaga Pendamping Profesional Kementerian Desa yang ada ditingkat Provinsi dan Desa sebagai pihak yang turut memfasilitasi proses pembangunan didesa. Studi literatur juga dilakukan melalui website dan jurnal penelitian sebelumnya terkait Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun. Penelitian ini juga melakukan analisis terhadap masing masing indikator pembentuk Indeks Desa Membangun yaitu Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi dan lebih khusus lagi Ketahanan Lingkungan serta hubungan diantara ketiganya. Pendekatan statistik sederhana dengan uji korelasi menggunakan program SPSS untuk menilai hubungan diantara IKS dan IKE, IKS dan IKL serta IKE dan IKL. Variabel yang digunakan adalah nilai IKS, IKE dan IKL yang terdapat dalam IDM desa desa Kabupaten Lombok Barat tahun 2024.

## Hasil dan Pembahasan

### Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa yang didukung oleh Dana Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Dalam IDM, permasalahan lingkungan masuk dalam penilaian bersama dengan aspek sosial dan ekonomi (Kementerian Desa PDTT, 2016).

Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{IKS+IKE+IKL}{3}$$

IDM : Indeks Desa Membangun  
 IKS : Indeks Ketahanan Sosial  
 IKE : Indeks Ketahanan Ekonomi  
 IKL : Indeks Ketahanan Lingkungan

Setiap indikator pada tiap Indeks diberikan skor antara 0 sampai dengan 5. Skor yang semakin tinggi mencerminkan tingkat keberartian pada setiap indikator. Hasil dari perhitungan ini dipergunakan untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar klasifikasi rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Sangat Tertinggal :  $IDM \leq 0,4907$
2. Desa Tertinggal :  $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
3. Desa Berkembang :  $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
4. Desa Maju :  $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
5. Desa Mandiri :  $IDM > 0,8155$

Indeks Desa Membangun mencerminkan angka yang mewakili perkembangan kemajuan dan kemandirian desa. Desa Maju dan Mandiri, yang warganya memiliki Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi, dan Ketahanan Ekologi merupakan bentuk penerapan UU Desa dengan SDGs Desa sebagai peta jalannya (Kemendesa PDTT, 2022). Evaluasi terhadap pengembangan potensi desa berdasarkan dimensi IDM sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan (Firmansyah et.al., 2024).

Ketiga komponen pendukung IDM yaitu IKS, IKE dan IKL masing masing memiliki dimensi perangkat indikator yang berbeda. IKS terdiri dari 4 dimensi yaitu Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman yang dijabarkan dalam 35 indikator. Dimensi Modal Sosial menilai solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk dan kesejahteraan sosial. Dimensi Kesehatan menilai akses pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan. Dimensi Pendidikan menilai akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, Pendidikan non formal dan akses ke pengetahuan. Dimensi Permukiman menilai akses Sanitasi, Air Bersih, Listrik dan Fasilitas Informasi dan Komunikasi. Untuk IKE terdiri dari hanya satu Dimensi yaitu Dimensi Ekonomi yang dijabarkan dalam 12 indikator dengan perangkat indicator keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat pelayanan perdagangan, akses ke Lembaga keuangan dan keterbukaan wilayah. Sementara itu untuk IKL sendiri terdiri dari 3 dimensi yaitu Dimensi Kualitas Lingkungan dengan perangkat indicator pencemaran, Dimensi Rawan Bencana dengan indikator jumlah jenis kejadian bencana dan Dimensi Tanggap Bencana dengan perangkat indikator jumlah fasilitas mitigasi/tanggap bencana.

### **Perkembangan Pembangunan Desa Kabupaten Lombok Barat**

Perkembangan IDM Kabupaten Lombok Barat selama 5 (lima) tahun pada 119 desa sebagai berikut:

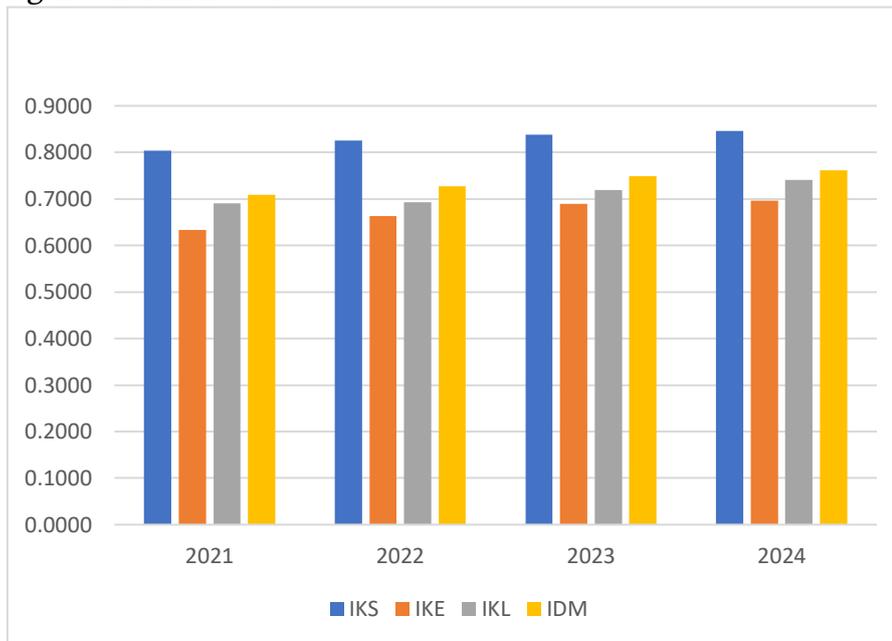
Tabel 1. IDM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024

Status desa	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Mandiri	4	6	10	17	22
Maju	28	42	55	69	73
Berkembang	87	71	54	33	24
Tertinggal	-	-	-	-	-
Sangat tertinggal	-	-	-	-	-

Sumber: DPMPD DUKCAPIL NTB

Perkembangan IDM Kabupaten Lombok Barat, tidak terdapat lagi Desa dengan Status Tertinggal dan Sangat Tertinggal. Desa tertinggal adalah desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim (Hidayati, 2021). Desa tertinggal juga memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya (Hendrarso *et al.*, 2021). Sementara itu, Desa Maju dan Mandiri terus bertambah setiap tahun, ditandai dengan berkurangnya Desa Berkembang. Hal ini menandakan bahwa, indikator indikator pendukung didalam IKS, IKE dan IKL di desa desa telah ada yang terpenuhi dan memberi kontribusi terhadap peningkatan kemandirian desa (Muhtarom *et al.*, 2018).

Perkembangan IKS, IKE dan IKL di Kabupaten Lombok Barat digambarkan dalam grafik dibawah ini.

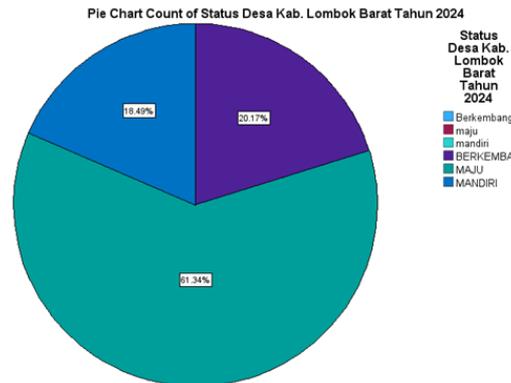


Gambar 1. Rincian IDM Kabupaten Lombok Barat tahun 2021-2024

Sumber: Data penelitian, 2024

Selama 4 tahun IKS selalu yang paling berpengaruh membentuk komposit IDM dibandingkan IKE dan IKL. Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan kesehatan, pendidikan, sanitasi dan air bersih, serta solidaritas dan toleransi penduduk dalam pembangunan desa desa sudah terpenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Aspek Ekonomi yang paling rendah memberikan kontribusi dalam IDM, hal ini menggambarkan bahwa di desa masih kurang terdapat keragaman hasil produksi masyarakat, akses ke pusat pelayanan perdagangan dan akses ke Lembaga Keuangan. Sementara untuk aspek lingkungan sedikit diatas aspek ekonomi, namun pada indikator lingkungan menunjukkan bahwa di desa masih terjadi pencemaran baik pencemaran air, tanah, udara, dan sungai serta belum maksimalnya mitigasi terhadap bencana. Upaya menaikkan nilai indeks ketahanan ekonomi dan ekologi menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah daerah dengan cara menentukan kegiatan-kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh desa untuk meningkatkan pembangunan dari segi ekonomi dan ekologi (Ariyanto, 2022).

Dalam Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2022, kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan yang diamankan yaitu; a) Mitigasi dan penanganan bencana alam, melalui kegiatan pengadaan, pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam sesuai kewenangan desa; b) Program prioritas Pemerintah dan pemerintah daerah : pengelolaan dan pengolahan sampah. Peraturan ini dapat menjadi rujukan bagi desa dalam memprioritaskan kegiatan pembangunan berbasis lingkungan didesa. Gambaran perkembangan status desa Kabupaten Lombok Barat:



Gambar 2. Prosentase status kemandirian desa Kabupaten Lombok Barat tahun 2024  
 Sumber: Data penelitian, 2024

Berdasarkan grafik, sebagian besar desa di Kabupaten Lombok Barat berada pada status Maju, yaitu sebesar 61,34%, diikuti oleh desa dengan status Berkembang sebesar 20,17%, dan Mandiri sebanyak 18,49%. Padahal, sebagaimana dikemukakan oleh Harjo (2017), tujuan akhir pembangunan desa adalah mencapai status Mandiri untuk seluruh desa. Dengan proporsi tersebut, secara keseluruhan status kemandirian Kabupaten Lombok Barat dapat dikategorikan sebagai Maju. Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dukcapil Provinsi NTB, menunjukkan bahwa Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Lombok Barat mencapai 0,7612,

dengan rincian skor: Indeks Ketahanan Sosial sebesar 0,8463, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 0,6959, dan Indeks Ketahanan Lingkungan sebesar 0,7412.

Pengelompokkan status perkembangan desa berdasarkan wilayah kecamatan sebagai berikut:

Tabel 2. IDM Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Desa	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang
Gerung	11	1	3	7
Kediri	10	3	7	-
Narmada	21	3	18	-
Sekotong	9	1	6	2
Labuapi	12	2	10	-
Gunungsari	16	-	10	6
jLingsar	15	4	10	1
Lembar	10	1	3	6
Batu layer	9	4	5	-
Kuripan	6	3	1	2
<b>TOTAL</b>	<b>119</b>	<b>22</b>	<b>73</b>	<b>24</b>

Sumber: DPMPD DUKCAPIL NTB

Data menunjukkan sebanyak 24 desa masih berstatus Berkembang, dengan jumlah terbanyak ada di Kecamatan Gerung diikuti kecamatan Gunungsari dan Lembar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah kabupaten, kecamatan, dan khususnya pemerintah desa yang bersangkutan untuk mengoptimalkan strategi pembangunan yang mampu mendorong percepatan peningkatan status kemandirian desa. Dalam hal ini, kecamatan memiliki peran strategis sebagai pembina teknis pemerintah desa (Istibsyaroh, 2024). Sementara itu desa dengan status Maju terbanyak ada di Kecamatan Narmada, diikuti Kecamatan Labuapi, Gunungsari dan Lingsar. 3 wilayah lain yang masih rendah yaitu kecamatan Gerung, Lembar dan Kuripan. Untuk desa berstatus Mandiri, secara umum jumlahnya masih terbatas, yakni berkisar antara 1 hingga 4 desa di setiap kecamatan. Desa Mandiri terbanyak berada di Kecamatan Lingsar dan Batu Layer, sedangkan Kecamatan Gunungsari tercatat belum memiliki desa berstatus Mandiri.

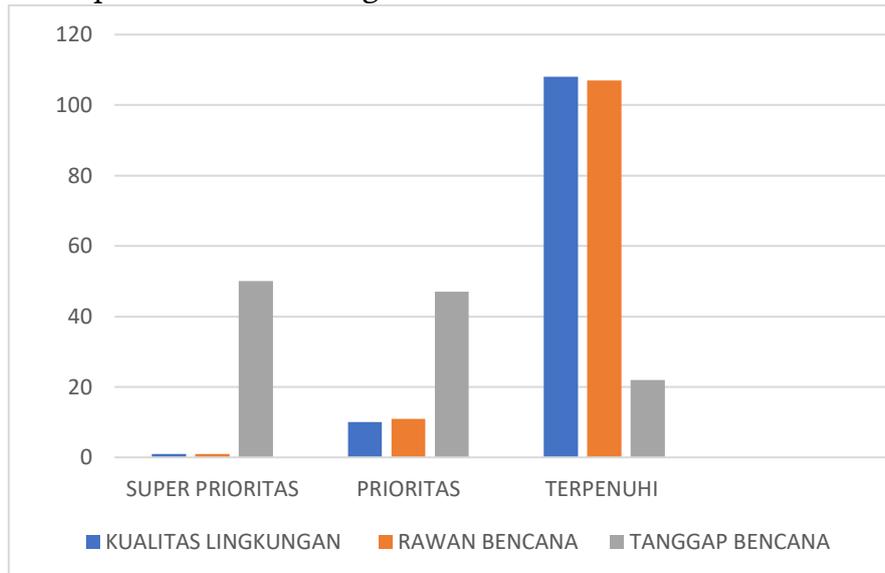
Upaya optimalisasi pembangunan desa dapat dilakukan melalui perencanaan program yang lebih terarah dan berorientasi pada pemenuhan indikator dalam ketiga indeks komposit IDM, yakni Ketahanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan tercipta pembangunan desa yang lebih berkualitas dan berkelanjutan (Sudianing & Seputra, 2020).

### Pembangunan Desa Berbasis Lingkungan di Kabupaten Lombok Barat

Secara geografi wilayah Kabupaten Lombok Barat termasuk salah satu wilayah rawan bencana (Ridha et al.,2024), ditandai dengan terjadinya berbagai kejadian bencana alam seperti banjir, longsor, pencemaran dan gempa bumi. Pemerintah desa sebagai unsur pemerintahan terkecil memiliki peranan dalam pembangunan untuk meminimalkan potensi terjadinya bencana danatau melakukan mitigasi tanggap darurat terhadap bencana (Ilham, 2024).

Program kegiatan di perencanaan dan pembangunan desa dapat dioptimalkan pada 2 dimensi pendukung IKL yaitu; 1) Dimensi Kualitas Lingkungan, dengan 2 perangkat indicator yaitu Ada atau tidaknya pencemaran air, tanah dan udara, dan terdapatnya Sungai yang terkena limbah; 2) Dimensi Potensi Rawan Bencana dan Tanggap Bencana, dijabarkan kedalam 2 perangkat indicator yaitu Kejadian Bencana Alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan) dan Upaya/Tindakan terhadap potensi bencana alam (Tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Hasil penilaian IDM Kabupaten Lombok Barat tahun 2024 diperoleh gambaran IKL pada 119 Desa sebagai berikut:



Grafik 3. Komponen Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan Kab.Lombok Barat Tahun 2024.

Pengklasifikasian kelompok prioritas desa dijabarkan dalam kategori komponen Indeks desa. Komponen Indeks Desa Membangun adalah jumlah desa yang masuk dalam 3 kategori yaitu; 1) Terpenuhi (bila nilai > 0,76 (76%)); 2) Prioritas (bila nilai 0,50 – 0,75); 3) Sangat prioritas (bila nilai < 0,50). Dari data terlihat bahwa rata rata desa berada pada kategori Terpenuhi untuk indikator Kualitas Lingkungan dan Rawan Bencana, namun pada indikator Tanggap Bencana masih rendah. Rincian kategori desa dengan perangkat indikatornya sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi tingkat prioritas IKL Kabupaten Lombok Barat Tahun 2024

Perangkat Indikator	Indikator	Super	Prioritas	Terpenuhi
		(0,00% - 50%)	(0,50% - 0,75%)	(0,76% - 1,0%)
Kualitas Lingkungan	Pencemaran Air, Tanah,Udara dan sungai terkena limbah	1 desa	10 desa	108 desa
Potensi Rawan Bencana	Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah Longsor, Kebakaran Hutan)	1 desa	11 desa	107 desa

Tanggap Bencana	Upaya/Tindakan terhadap Potensi Bencana Alam	50 desa	47 desa	22 desa
		-	-	-

Sumber: DPMPD DUKCAPIL NTB

1. Perangkat Indikator Kualitas Lingkungan

- a. Super Prioritas. Kategori Super Prioritas ada pada Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong, dimana di Desa ini terdapat 3 jenis pencemaran yaitu pencemaran air, tanah dan sungai.
- b. Prioritas. Kategori Prioritas ada pada desa yang masih terdapat 2 jenis pencemaran diantaranya adalah : pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan terdapat sungai yang terkena pembuangan limbah. Terdapat 10 desa dengan kategori Prioritas yaitu Desa Suka Makmur dan Taman Ayu di Kecamatan Gerung; Desa Batu Kuta dan Mekar Sari di kecamatan Narmada; Desa Buwun Mas kecamatan Sekotong; Desa Bengkel Kecamatan Labuapi; Desa Guntur Macan kecamatan Gunung sari; Desa Lingsar, Desa Duman dan desa Gontoran di kecamatan Lingsar.
- c. Terpenuhi. Kategori Terpenuhi ada pada desa yang memiliki pencemaran antara 0-1 jenis baik itu pencemaran air, tanah, udara maupun terdapatnya limbah di sungai. Kategori ini ada pada 108 desa diluar kategori Prioritas dan Super prioritas.

Rekomendasi terhadap terjadinya penemaran di desa adalah dengan melakukan identifikasi penyebab terjadinya pencemaran dan penanganan terhadap jenis pencemaran yang ada baik berupa kegiatan kegiatan dalam bentuk edukasi, advokasi kegiatan maupun implementasi program kegiatan secara langsung.

2. Perangkat Indikator Potensi Rawan Bencana

- a. Super Prioritas. Kategori Super Prioritas ada pada Desa Pelangan Kecamatan sekotong, dimana di desa ini terjadi 3 jenis kejadian bencana dalam 1 tahun yaitu banjir, tanah longsor dan kebakaran.
- b. Prioritas. Kategori Prioritas ada pada desa dimana terdapat 1-2 jenis kejadian bencana yaitu bencana tanah longsor dan/banjir dan/kebakaran. Terdapat 11 desa dengan kategori Prioritas yaitu Desa Mesanggok Kecamatan Gerung; Desa Kekait, Dopang dan Guntur Macan Kecamatan Gunungsari; Desa Sekotong Timur, Labuan Tereng, Jembatan Gantung, Jembatan kembar Timur; Desa Batu Layar, Pusuk Lestari, dan Senggigi Kecamatan Batu Layar.
- c. Terpenuhi. Kategori Terpenuhi ada pada desa yang terdapat 0-1 jenis kejadian bencana. Kategori ini ada pada 107 desa diluar kategori prioritas dan Super prioritas.

Rekomendasi terhadap terjadinya bencana di desa adalah dengan melakukan identifikasi penyebab terjadinya bencana dan penanganan terhadap jenis bencana berupa kegiatan kegiatan dalam bentuk edukasi, advokasi kegiatan maupun implementasi program kegiatan secara langsung untuk pencegahan dan penanganan.

3. Perangkat Indikator Tanggap Bencana

- a. Super Prioritas. Kategori Super Prioritas ada pada 50 desa yang tidak memiliki fasilitas mitigasi bencana.

- b. Prioritas. Kategori Prioritas ada pada 47 desa yang memiliki 1 fasilitas mitigasi bencana.
- c. Terpenuhi. Kategori Terpenuhi ada pada desa 22 desa yang memiliki 2-3 fasilitas mitigasi bencana.

Rekomendasi terhadap indikator tanggap bencana yang dapat dilakukan adalah pembangunan/pengadaan 1-3 fasilitas mitigasi bencana sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana). Fasilitas mitigasi/tanggap bencana berupa peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan dan jalur evakuasi.

**Kegiatan pembangunan berbasis lingkungan didesa**

Perangkat indikator yang masih rendah pada IKL di Kabupaten Lombok Barat adalah pada indikator tanggap bencana. Dari 119 desa sebanyak 50 desa atau 42% desa masuk dalam kategori Super Prioritas, yang artinya bahwa ada 50 desa yang belum memiliki 3 fasilitas mitigasi bencana alam berupa peringatan dini, perlengkapan keselamatan dan jalur evakuasi. Sementara pada kategori Prioritas telah terdapat 1 mitigasi bencana. Untuk memenuhi indikator tersebut, desa dapat melaksanakan kegiatan pengadaan mitigasi bencana baik untuk peringatan dini, perlengkapan keselamatan maupun jalur evakuasi sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan. Penanggulangan bencana adalah upaya untuk mengurangi dampak negatif bencana, melalui kegiatan sebelum, saat, dan sesudah bencana (Solikhah *et al.*, 2020). Dengan ini desa diharapkan melaksanakan antisipasi dini bencana untuk mengurangi resiko baik fisik maupun sosial. Desa Tangguh Bencana adalah desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumberdaya masyarakat untuk mengurangi risiko bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika terkena bencana (Zulkifli *et al.*, 2022).

Tabel 4. Kondisi ketahanan lingkungan pada 3 desa sampel Tahun 2024

Desa	Status IDM	Kualitas Lingkungan	Rawan Bencana	Tanggap Bencana
Lingsar	Mandiri	Prioritas	Terpenuhi	Terpenuhi
Keru	Maju	Terpenuhi	Terpenuhi	Super prioritas
Taman Ayu	Berkembang	Prioritas	Terpenuhi	Terpenuhi

Sumber: DPMPD DUKCAPIL NTB

Kontribusi status Mandiri Desa Lingsar dan status Maju Desa Keru lebih banyak dipengaruhi oleh IKS, sebaliknya pada Desa Taman Ayu IKS yang paling rendah memberi kontribusi dibanding IKL.

- a. Desa Lingsar. Terdapat 2 pencemaran di Desa Lingsar yaitu Udara dan Sungai. Kegiatan yang dilaksanakan dalam APBDesa adalah pengadaan kendaraan pengangkut sampah (roda 3), operasional kendaraan pengangkut sampah, dukungan operasional TPS, dan kegiatan peremajaan pohon. Kegiatan yang dilaksanakan belum menyentuh langsung penyebab pencemaran.
- b. Desa Keru. Indikator lemah Desa Keru adalah Tanggap Bencana, menandakan bahwa tidak ada fasilitas mitigasi bencana yang tersedia baik berupa peringatan dini, perlengkapan keselamatan maupun jalur evakuasi. Hal inilah yang menyebabkan IKL tergolong rendah. Kegiatan yang dilaksanakan desa berupa

- Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah dan kegiatan penanggulangan bencana, namun tidak dalam bentuk fasilitas mitigasi.
- c. Desa Taman Ayu. Terdapat 2 pencemaran di Desa Taman Ayu yaitu Udara dan Sungai. Penyebab pencemaran adalah akibat aktivitas penambangan material galian C yang cukup masif di desa. Aktivitas kendaraan pengangkut dengan volume cukup besar menyebabkan pencemaran udara. Selain itu disalah satu dusun menjadi areal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongo bagi sampah Kota Mataram. Hal ini menyebabkan pencemaran air, udara dan tanah. Disamping itu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jeranjang berada di wilayah Desa Taman Ayu. Aktifitas tambang, TPA dan PLTU ini diluar kewenangan desa, sehingga desa hanya mampu melaksanakan kegiatan pencegahan dalam skala lokal saja. Kegiatan yang dilaksanakan desa sesuai dokumen perencanaan adalah pengadaan bak sampah, padat karya pembersihan saluran, kesiapan tanggap bencana, pelatihan tanggap bencana dan perlengkapan, pengadaan jaring besi penyaring sampah, pengadaan mobil pengangkut sampah dan insentif operator. Nilai rendah pada IKL adalah pada indikator kualitas lingkungan, hal inilah yang menyebabkan status Desa Taman Ayu tidak berubah selama 5 tahun.

Sebagai pedoman desa melaksanakan pembangunan, Kementerian Desa setiap tahun menerbitkan Peraturan Desa tentang Prioritas Penggunaan dana Desa. Prioritas ini dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar; pembangunan sarana dan prasarana Desa; pengembangan potensi ekonomi lokal; dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (kementerian desa, 2022). Kegiatan kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Pembangunan sarana prasarana dalam rangka mitigasi, pencegahan bencana alam, penanggulangan bencana alam, dan akibat perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan karena terjadi perubahan cuaca ekstrem.
- b. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan; pengelolaan lingkungan Desa, dan pelestarian sumber daya alam Desa.
- c. Penguatan dan fasilitasi masyarakat desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam;

Desa dapat melaksanakan kegiatan sesuai masalah apa yang dihadapi sehingga tepat menyelesaikan persoalan. Bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan berupa yaitu; 1) Penyediaan informasi dan peta wilayah rawan bencana untuk tiap jenis bencana di desa; 2) Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi keadaan bencana; 3) Pengaturan dan penataan kawasan, jalur evakuasi rawan bencana untuk mengurangi ancaman bencana; 4) Upaya pencegahan dari potensi bencana yang bisa terukur (banjir luapan sungai, genangan dipemukiman; 5) sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana; 6) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana; 7) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; 8) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam; 9) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; 10) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi.

Sementara untuk pencemaran lingkungan perlu dilaksanakan kegiatan kegiatan yang mengarah pada pengelolaan lingkungan Desa, pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan, Pembangunan/perbaikan/rehabilitasi

tempat pembuangan sampah, pengelolaan air limbah komunal di desa, pengelolaan air limbah domestic, pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan, dan lain lain kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai kewenangan desa.

Untuk pelestarian sumber daya alam desa dapat melalui: pembibitan pohon langka; perlindungan terumbu karang; pembersihan daerah aliran sungai; pembangunan ruang terbuka hijau; pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai); melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan kegiatan pelestarian sumberdaya alam lainnya sesuai kewenangan Desa

Pengukuran status kemajuan desa tetap menjadi alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 9 tahun 2024 tentang Indeks Desa, perhitungan Indeks Desa Membangun mulai tahun 2025 berubah menjadi Indeks Desa. Indeks Desa adalah indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan dan kemandirian desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan desa yang berkelanjutan. Indeks Desa terdiri atas komponen dimensi layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa (Kementerian Desa PDT RI, 2024). Dimensi lingkungan tetap menjadi salah satu bagian yang diprioritaskan didalam pembangunan desa.

### **Hubungan antara dimensi pembentuk Indeks Desa Membangun**

#### **1. Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Ekonomi**

Menggunakan Program SPSS hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai  $r=0,491$ ,  $p=0,001 < 0,05$ ,  $r^2=0,24$ ,  $N=119$  (Output SPSS terlampir). Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Sosial memiliki hubungan korelasi dengan Indeks ketahanan Ekonomi, namun hubungan ini lemah dan tidak terlalu kuat.

Dalam Indeks Ketahanan Sosial ini terdapat 35 indikator, dimana 3 indikator nya dapat berpengaruh terhadap Indeks Ketahanan Ekonomi yaitu akses terhadap pusat ketrampilan/kursus, akses terhadap listrik, dan akses terhadap internet. Dengan adanya pusat ketrampilan, listrik dan internet mempengaruhi keragaman produksi mikro di desa, demikian juga jika terdapat jasa kedai/penginapan dapat dipublikasi jika ada internet dan listrik didesa. Sebaliknya juga dengan indikator keterbukaan wilayah dalam Indeks Ketahanan Ekonomi dapat berpengaruh terhadap ketersediaan akses Pendidikan dan Kesehatan dalam Indeks Ketahanan Sosial. Namun hubungan keduanya ini tidak terlalu kuat.

#### **2. Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan**

Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai  $r=0,013$ ,  $p=0,887 > 0,05$ ,  $r^2=0,000$ ,  $N=119$ . Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Lingkungan tidak memiliki hubungan korelasi satu sama lain. Indikator pada masing masing indeks berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi.

#### **3. Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Ekonomi**

Hasil uji korelasi Pearson diperoleh nilai  $r=-0,010$ ,  $p=0,918 > 0,05$ ,  $r^2=0,000$ ,  $N=119$ . Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Ketahanan Lingkungan dan Indeks Ketahanan Ekonomi juga tidak memiliki hubungan korelasi satu sama lain. Indikator pada masing masing indeks berdiri sendiri dan tidak saling mempengaruhi.

## Kesimpulan

Status kemandirian desa di Kabupaten Lombok Barat menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Mayoritas desa berada pada status Maju (61,34%), diikuti Berkembang (20,17%) dan Mandiri (18,49%), dengan status kemandirian Kabupaten secara keseluruhan berada pada kategori Maju. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan desa yang cukup baik, namun peningkatan menuju desa Mandiri masih menjadi tantangan yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan aspek lingkungan dan ekonomi. Ketahanan Sosial merupakan faktor paling berpengaruh terhadap Indeks Desa Membangun (IDM), disusul oleh Ketahanan Lingkungan, dan terakhir Ketahanan Ekonomi. Secara teoritis, temuan ini memperkuat pendekatan pembangunan berbasis sosial yang mengedepankan kapasitas masyarakat, kohesi sosial, dan akses terhadap pelayanan dasar sebagai pondasi utama dalam mempercepat pembangunan desa.

Pada Indeks Ketahanan Lingkungan, indikator Tanggap Bencana menjadi komponen yang masih lemah. Sebanyak 50 desa masuk dalam kategori Super Prioritas, dan 47 desa dalam kategori Prioritas, karena belum memiliki fasilitas mitigasi bencana seperti peringatan dini, perlengkapan keselamatan, dan jalur evakuasi. Implikasi kebijakan dari temuan ini adalah pentingnya prioritas pembangunan infrastruktur kebencanaan berbasis risiko lokal dalam dokumen perencanaan desa dan dukungan lintas sektor. Indikator yang relatif baik pada Ketahanan Lingkungan adalah Kualitas Lingkungan, dengan hanya 1 desa dalam kategori super prioritas (terjadi 4 jenis pencemaran) dan 10 desa dalam kategori prioritas (terjadi 2 jenis pencemaran). Sebanyak 108 desa mengalami 0–1 jenis pencemaran, yang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan belum menjadi isu dominan. Secara teoritis, hal ini memperkuat pentingnya perlindungan sumber daya lokal sebagai faktor pendorong keberlanjutan lingkungan desa.

Analisis korelasi menunjukkan bahwa hubungan antara Indeks Ketahanan Sosial dan Indeks Ketahanan Ekonomi hanya bersifat lemah, sedangkan tidak ditemukan hubungan signifikan antara Ketahanan Sosial dan Lingkungan, serta antara Ketahanan Lingkungan dan Ekonomi. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis bahwa masing-masing pilar ketahanan dalam IDM di Kabupaten Lombok Barat berdiri secara relatif independen. Oleh karena itu, pendekatan integratif lintas sektor dan lintas pilar perlu diperkuat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar tercipta sinergi dalam mencapai status desa Mandiri.

## Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan, terima kasih juga kepada Dr. Ibrahim Ali dan Dr. Nurhayati selaku pembimbing atas bimbingan, masukan, dan dukungannya, dan kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penelitian ini. Kami mengapresiasi masukan berharga dari editor dan reviewer yang membantu memperbaiki kualitas naskah ini hingga layak diterbitkan.

## Referensi

Amru, K., Anjani, R., Plamonia, N., & Dewa, R. P. (2025). Kajian Daya Dukung Lingkungan Berbasis Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Ibu Kota Nusantara. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 26(1), 075-081. <https://ejournal.brin.go.id/JTL/article/view/4471>.

- Anwar, M. (2022). Green economy sebagai strategi dalam menangani masalah ekonomi dan multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343-356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>.
- Ariyanto, O. (2022). Pengaruh APBDes Terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) Dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Di Kabupaten Lampung Selatan', (IDM). *Tesis*. Universitas Lampung.
- Astika, A. N., & Sri Subawa, N. (2021). Evaluasi Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 5(2), 223-232. <https://doi.org/10.31604/jim.v5i2.2021.223-232>.
- Bura, F. X. M. (2021). Perkembangan desa berdasarkan indeks desa membangun di kabupaten mempawah. *Jurnal borneo akcaya*, 7(1), 10-20. <https://doi.org/10.51266/borneoakcaya.v7i1.196>.
- Fasya, M. N., Prayitno, G., & Subagiyo, A. (2020). Hubungan kemiskinan dan indeks desa membangun di Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. *Planning for Urban Region and Environment Journal (PURE)*, 9(3), 223-232. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/150>.
- Firmansyah, D. K., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi Desa Berbasis Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e-ISSN: 2797-0469)*, 4(04), 217-222. <https://doi.org/10.69957/paob.v4i04.1607>.
- Harjo, B. (2017). Model membangun desa mandiri. *Jurnal Sosial dan Humanis Sains (JSHS)*, 2(1), 27-35. <https://doi.org/10.24967/jshs.v2i1.106>.
- Hendrarso, P., Handoko, P., Ramdhani, M. F. A., Andayani, N., & Tania, R. (2021). Kajian Pengentasan Desa Tertinggal Melalui Pendekatan Indeks Desa Membangun. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 57-69. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i1.1607>.
- Hidayat, F., Baroka, R. T., Ananta, K. P., & Pramasha, R. R. (2025). Pengaruh Eksploitasi Sumber Daya Alam terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 3(1), 1-5. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/565>.
- Hidayati, R. A. (2021). Analisis potensi desa berbasis Indeks Pembangunan Desa di wilayah pesisir Kabupaten Gresik. *Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 25-32. <https://doi.org/10.30587/jre.v4i1.2161>.
- Ilham, A. A. (2024). Mitigasi Bencana Melalui Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Badung Kelurahan Tanjung Benoa Provinsi Bali. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(1), 59-75. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3770>.
- Istibsyaroh, I. (2024). Peran Camat Selaku Pembina Dan Pengawas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Sukorejo Kabupaten

- Pasuruan. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, 7(2), 165-172. <https://doi.org/10.37504/map.v7i2.604>.
- Kemendesa PDPT, (2016). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. Kemendesa PDPT.
- Kemendesa PDPT, (2020). *Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kemendesa PDPT.
- Kemendesa PDPT, (2022). *Buku Panduan Desa Peduli Penghidupan Berkelanjutan*. Kemendesa PDPT.
- Muharuddin, M. (2019). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan. *Justisi*, 5(2), 97-112. <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544>.
- Muhtarom, N. K., & Purwanti, E. (2018). Analisis Indeks Desa Membangun Untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. *Inovasi Pembangunan–Jurnal Kelitbangan*, 6(2), 179-190. <https://doi.org/10.35450/jip.v6i02.96>.
- Nugroho, S. F., & Pangaribowo, E. H. (2024). Pengaruh dimensi pembangunan berkelanjutan terhadap kualitas lingkungan hidup di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (Journal of Environmental Sustainability Management)*, 326-346. <https://doi.org/10.36813/jplb.8.3.326-346>.
- Oktaviana, O., & Bachruddin, D. T. (2017, December). Upaya Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Wilayah Provinsi Banten Melalui Intervensi Kebijakan Pemerintah Provinsi. In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan* (pp. 31-45). Laboratorium Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Ridha, R., Susanti, F., & Yunanti, S. R. (2024). Analisis Zonasi dan Kesesuaian Kebijakan Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Bencana Longsor Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Spatial: Wahana Komunikasi Dan Informasi Geografi*, 24(1), 41-54. <https://doi.org/10.21009/spatial.241.005>.
- Solikhah, M. M. A., Krisdianto, M. A., & Kusumawardani, L. H. (2020). Pengaruh Pelatihan Kader Tanggap Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Bencana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan Indonesia*, 10(04), 156-162. <https://doi.org/10.33221/jiiki.v10i04.800>.
- Subekti, T., & Ulfah, I. F. (2022). Dampak Pengelolaan Dana Desa terhadap Ketahanan Lingkungan Studi pada Desa Ngroto Kecamatan Pujon Kabupaten Malang. *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-23. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i1.10819>.
- Sudianing, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam menunjang peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. *Locus*, 11(2), 112-133. <https://doi.org/10.37637/locus.v11i2.284>.

- Widaningsih, M., & Puspita, M. (2017). Penyusunan Grand Desain Pengentasan Kemiskinan di kabupaten Garut. In *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Kawasan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan*. Untirta Press.
- Zulkifli, L., Emilga, E. V., Abdurrahman, M. G., Daniswara, L., Basitha, M., & Ariesta, M. G. D. (2022). Sosialisasi Mitigasi Bencana dan Pemetaan Jalur Evakuasi untuk Mendukung Desa Sengkol Sebagai Desa Tanggap Bencana. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(1), 295-299. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v3i2.1477>.